

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Provinsi yang didirikan pada tahun 1960 dengan nama daerah tingkat I yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara yang di mana pusat Ibukota awalnya berada di Kota Makassar. Saat ini Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 Kota dan 21 Kabupaten yang meliputi: Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Wajo dan didirikan dengan menggunakan UU No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah. Dan saat ini memiliki jumlah penduduk ada sebanyak 8.432.200 dari data statistik terakhir yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, yang di mana jika diukur dari total penduduk yang ada di Indonesia, jumlah penduduk yang tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan ada sekitar 3,34% dari total penduduk Indonesia (Sumber: <https://sulselprov.go.id/>).

Ditinjau dari peringkat dan status kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2015, peringkat tertinggi masih dimiliki oleh Provinsi yang berdomisili di Pulau Jawa, tetapi Provinsi Sulawesi Selatan masih termasuk peringkat dan kinerja tertinggi dari setiap Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat 10 besar peringkat dan status kinerja pemerintah daerah pada tahun 2015 diantara provinsi yang memiliki peringkat tertinggi lainnya yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan

Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, di mana Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2015 berada di peringkat ke-7 untuk peringkat dan status kinerja terhadap 30 Provinsi secara nasional (Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015).

Tabel 1.1
Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional pada tahun 2015

No	Provinsi	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Jawa Timur	1	3,1802	Sangat Tinggi
2	Jawa Barat	2	3,1760	Sangat Tinggi
3	Kalimantan Timur	3	3,1469	Sangat Tinggi
4	DKI Jakarta	4	3,0560	Sangat Tinggi
5	Jawa Tengah	5	3,0539	Sangat Tinggi
6	Nusa Tenggara Barat	6	2,9079	Tinggi
7	Sulawesi Selatan	7	2,8971	Tinggi
8	DI Yogyakarta	8	2,8707	Tinggi
9	Gorontalo	9	2,8438	Tinggi
10	Kepulauan Riau	10	2,8263	Tinggi

Sumber: <http://www.otda.kemendagri.go.id/> (2017)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintahan Daerah” bahwa otonomi daerah menjadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dari pasal tersebut sudah dijelaskan dengan rinci bahwa setiap daerah punya kewenangan masing-masing dalam mengurus daerah tersebut, sehingga fungsi selanjutnya diturunkan kepada kepala daerah baik pemerintahan daerah yang ada di daerah tingkat I maupun tingkat II bersama dengan DPRD baik

yang berada di tingkat Provinsi maupun yang berada di tingkat Kota/Kabupaten. Munculnya pelimpahan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah sendiri dalam konteks kinerja pemerintah memberikan dua sisi yang berbeda di mana di sisi pertama pemerintah memiliki kewenangan yang begitu luas atas daerahnya sedangkan di sisi lainnya kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan mendapatkan tugas berat yang mengikuti aturan otonomi daerah tersebut yaitu tingginya transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat dari seluruh kinerja pemerintah daerah. Dampaknya, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapat oleh Pemda ataupun mengetahui program/pelayanan yang dijalankan dan berfungsi dalam menilai prestasi program/pelayanan (Meilina, 2016).

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Kinerja Pemerintah Daerah harus dapat diinformasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai tingkatan pencapaian hasil, yang dikaitkan dengan misi dan visi organisasi serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari kebijakan operasional yang telah diambil (Suripto, 2011:1). Keterkaitan antara Kinerja Pemerintah Daerah dengan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah sangat erat, karena dari laporan tersebut dapat dilihat bagaimana kinerja yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 mengungkapkan bahwa EKPPD merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Pada beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa variabel dari kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK,

Partisipasi Penyusunan Anggaran serta Komitmen Organisasi. Karakteristik Pemerintah Daerah terdiri atas umur administratif Pemerintah Daerah, kekayaan Pemerintah Daerah, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, ukuran Pemerintah Daerah, dan belanja modal. Kemudian, variabel lain yang juga ikut serta di dalam mendukung atau mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Temuan Audit BPK. Menurut Sedyaningsih (2014) mengungkapkan bahwa Temuan Audit BPK merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan menunjukkan berapa banyak pelanggaran yang ditemukan oleh BPK serta adanya kerugian material yang ditimbulkan karena pelanggaran tersebut. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dan perencanaan atas penyusunan anggaran dan berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah (Yanida dkk, 2013). Partisipasi penyusunan anggaran juga menjadi salah satu variabel kemajuan kinerja Pemerintah Daerah karena pada partisipasi penyusunan anggaran tersebut bisa dilihat bahwa setiap pegawai pemerintahan bisa menetapkan target atas apa yang telah ditetapkan pada saat penyusunan anggaran dan meningkatkan kinerja manajerial atas Pemerintah Daerah (Nazaruddin, 2012). Kemudian, pernyataan lainnya juga mengungkapkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh pada kinerja karena membuat individu lebih mementingkan kepentingan organisasi dan berdampak kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Purwandani, 2012).

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai variabel yaitu karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan audit dari BPK yang akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Alasan mengapa penelitian ini menggunakan kedua variabel tersebut adalah pada variabel karakteristik Pemerintah Daerah lebih menunjukkan bagaimana penyelenggaraan urusan desentralisasi yang berhubungan dengan urusan wajib dan urusan pilihan serta Kabupaten/Kota masih sangat tergantung pada tanggungjawab dan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerahnya (Utomo, 2015). Sedangkan pada variabel temuan audit BPK alasan yang

mendasari untuk meneliti variabel tersebut yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah adalah semakin banyak temuan audit maka hal itu akan berpengaruh kepada kinerja Pemerintah Daerah di mana kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan akan semakin menurun. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintahan daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Meilina, 2016). Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menjelaskan secara luas gambaran karakteristik pemerintah Daerah. Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari banyak faktor seperti besar kecilnya kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, tingkat ketergantungan pada pusat yang diukur menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), dan ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan total aset pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013).

Pada Karakteristik Pemerintah Daerah, yang ingin dibahas terlebih dahulu yaitu mengenai kekayaan daerah. Kekayaan daerah ditinjau melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kekayaan daerah berdampak positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah Daerah karena semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka semakin tinggi juga skor yang di dapatkan dalam penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (Mustikarini dkk, 2012). Namun ada hal yang berbeda yang diungkapkan oleh Sedyaningsih (2014) yang mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh antara tingkat kekayaan daerah dengan PAD karena porsi PAD yang masih sangat rendah dengan melihat rata-rata PAD yang dimiliki atau diperoleh dari setiap Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2009-2012.

Kemudian yang menjadi indikator Karakteristik Pemerintah Daerah adalah Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat yang digunakan dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut beberapa penelitian

sebelumnya menyebutkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dikarenakan semakin tinggi tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat maka semakin tinggi juga skor kinerja Pemerintah Daerah yang mana membuat Pemerintah Daerah lebih berhati-hati terhadap segala sesuatu yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah (Mustikarini dkk, 2012). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sedyaningsih (2014) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif pada Kinerja Pemerintah Daerah karena tidak memberikan stimulus bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terlalu mematok pada pemberian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

Hal yang terakhir yang akan dibahas mengenai Karakteristik Pemerintah Daerah adalah Ukuran Pemerintah Daerah memperlihatkan bahwa Total Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang negatif karena semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu daerah belum tentu berpengaruh besar terhadap skor kinerja suatu Pemerintah Daerah (Sedyaningsih, 2014). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Marfiana dkk (2013) yang memaparkan bahwa peran total aset belum tentu dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Selain Karakteristik Pemerintah Daerah, hal lain yang juga menjadi salah satu hal dijadikan indikator adalah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan Audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelanggaran yang dilakukan oleh suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari temuan yang didapatkan oleh BPK ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang menghasilkan berupa opini, temuan, kesimpulan atau bentuk rekomendasi. Dalam hal ini, penelitian menggunakan temuan audit BPK atas temuan pemeriksaan dan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah (Sudarsana, 2013).

Tabel 1.2

Jumlah Temuan Audit dan Skor Kinerja Pemerintah Daerah untuk beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan tahun 2012-2015

Tahun Anggaran	Keterangan	Status
2012	Jumlah Temuan dan Kerugian	Tidak ada temuan
	Kinerja/Skor	Tinggi (2,7260)
2013	Jumlah Temuan dan Kerugian	3 Temuan/Rp15.640.000.000
	Kinerja/Skor	Tinggi (2,6905)
2014	Jumlah Temuan dan Kerugian	3 Temuan/Rp3.780.000.000
	Kinerja/Skor	Tinggi (2,8422)
2015	Jumlah Temuan dan Kerugian	14 Temuan/Rp21.583.530.000.000
	Kinerja/Skor	Tinggi (2,8971)

Sumber: <http://bpk.go.id> dan <http://otda.kemendagri.go.id> (Data diolah 2017)

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh, dapat dilihat, pada tahun 2015, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki skor kinerja yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, 2013, dan 2014 namun temuan auditnya paling banyak diantara tahun yang sebelumnya yang menjadi tanda bahwa jumlah temuan semakin tinggi, tetapi kinerja untuk Pemerintah Daerah semakin tinggi juga. Hal ini berbeda dengan yang telah dipaparkan oleh Utomo (2015) yang mana menyebutkan bahwa semakin tinggi temuan audit BPK maka semakin rendah Kinerja Pemerintah Daerah karena semakin tingginya tingkat kerugian yang harus diterima oleh suatu instansi daerah dan mengikuti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini (2012).

Alasan pada penelitian ini hanya menggunakan hingga tahun 2015 saja karena data terakhir Laporan Pemeringkatan Pemerintah Daerah (LPPD) yang ada di laman

otda.kemendagri.go.id hanya mencantumkan hanya dengan sampai tahun 2015 saja kemudian pada beberapa LPPD tahun sebelumnya memiliki Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun yang sama untuk 2 tahun masa pelaporan LPPD contohnya seperti LPPD tahun 2012 dan tahun 2013 memiliki Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri 120-251 tahun 2014 untuk LPPD tahun 2012 dan Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri 120-4761 untuk LPPD tahun 2013.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015).**

1.3 Rumusan Masalah

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang memiliki peringkat kinerja yang tinggi di Indonesia di mana yang terdapat dalam Laporan Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan secara Nasional dari 2012 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan skor pada kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki temuan audit yang berbanding terbalik dengan kinerja di mana temuan audit semakin banyak tetapi kinerjanya semakin naik akan membuat penulis akan menyelidiki kesalahan apa yang terjadi antara temuan audit beserta dengan tingkat kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2015.
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit secara

simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2015.

3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.
 - b. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.
 - c. Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.
 - d. Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit pada Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.
 - b. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.
 - c. Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.

- d. Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dan tambahan referensi dalam penelitian berikutnya dalam menambah variabel penelitian, periode penelitian, dan obyek penelitian lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain.

1.6.2 Aspek Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta adanya perbaikan layanan publik seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sehingga dapat diharapkan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sebab tujuan adanya dilakukan evaluasi kinerja adalah mengetahui tingkat penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai pencapaian dan hasil yang diharapkan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai kecenderungan karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian dari Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri sudah baik, namun dalam hal kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan dalam pengelolaan keuangan Daerah yang telah diatur oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, data berupa laporan Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari tahun 2012 hingga 2015 yang diperoleh langsung dari *website* resmi Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang datanya diperoleh dari *website* dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melihat dan mengetahui karakteristik Pemerintah Daerah dan hasil pemeriksaan audit. Tujuannya tidak lain untuk mencapai kemajuan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

1.8 Sistematika Penulisan Tingkat Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi instansi maupun penelitian selanjutnya.